

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTARAN SUNGAI - STRATEGI PENGELOLAAN RUANG BERBASIS MASYARAKAT

Endy Marlina, Endah Tisnawati

*Program Studi Arsitektur - Fakultas Sains dan Teknologi - Universitas Teknologi Yogyakarta
endy_marlina@yahoo.com. endah.tisnawati@gmail.com*

ABSTRAK

Masalah Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, seperti dinyatakan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, menegaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan besar untuk aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Strategi ini didasari oleh pemahaman bahwa masyarakat adalah subyek, bukan obyek pembangunan.

Peningkatan intensitas pengalihfungsian lahan di daerah bantaran sungai di satu sisi dan intensitas kejadian bencana serta kemerosotan kualitas lingkungan di sisi lainnya mendasari pentingnya dilakukan upaya-upaya pengelolaan ruang khususnya di daerah bantaran sungai. Untuk menjamin keberhasilan kegiatan pengelolaan ruang serta sesuai dengan amanah hukum di atas, perlu ditemukan strategi pelibatan masyarakat yang tepat dalam kegiatan pengelolaan ruang. Penyusunan rumusan ini memerlukan pemahaman komprehensif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa karakter budaya masyarakat bantaran sungai yang spesifik merupakan kekayaan lokal. Nilai-nilai ini perlu dikelola untuk meningkatkan kemanafaatannya dalam upaya peningkatan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam usaha pengelolaan ruang yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan kualitas lingkungan. Semangat gotong royong, harmonisasi sosial, dan kepedulian lingkungan yang besar membimbing masyarakat untuk mengendalikan keinginan dan kepentingan pribadi dalam kolaborasi sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Semangat ini mampu melahirkan organisasi masyarakat yang solid yang berperan besar dalam kegiatan pengelolaan ruang.

Kata kunci: budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan ruang

1. Pendahuluan

Menurut pasal 28 h UUD 1945, rumah adalah hak dasar bagi rakyat. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk bertempat tinggal, lebih jauh lagi untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat. Peningkatan kebutuhan lahan yang sangat pesat mempengaruhi peningkatan pemanfaatan lahan (Sitorus, 2012). Terbatasnya ketersediaan lahan mengakibatkan variasi alternatif pengalihfungsian lahan, termasuk lahan di daerah bantaran sungai (Nasrullah., Kartiwa. 2010). Fenomena ini disejajarkan dengan intensitas bencana banjir dan tanah longsor yang tinggi menjadi dasar diperlukannya upaya pengendalian pengalihfungsian lahan di daerah bantaran sungai.

Dinamika perkembangan penduduk di Kabupaten Sleman yang berlangsung sangat pesat membawa pengaruh terhadap pemanfaatan lahan. Signifikansi peningkatan kebutuhan lahan mempengaruhi signifikansi pemanfaatan lahan di daerah bantaran sungai sebagai alternatif lahan murah dewasa ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh image Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata yang mengakibatkan Kabupaten Sleman menjadi daerah sasaran dominan pengalihfungsian lahan di DIY. Hal yang terlewat adalah bahwa pemanfaatan bantaran sungai yang tidak terkendali berpotensi memberikan gangguan terhadap fungsi sungai, bahkan dapat berdampak negatif terhadap ekosistem sungai.

Usaha pengelolaan daerah bantaran sungai merupakan kegiatan yang segera harus dilaksanakan. Perencanaan tata ruang yang mengakomodasi daerah rawan bencana sudah mulai disusun, namun demikian masih banyak masyarakat yang belum terinformasi. Salah satu kemungkinan, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Tidak jarang implementasi penataan ruang sebagai wujud penerapan dan penegakan peraturan/hukum khususnya terkait tata ruang serta upaya pemberdayaan masyarakat juga masih lemah. Pemantauan dan penerapan sistem peringatan dini serta teknologi untuk penanganan bencana masih minim.

2. Metode Penelitian

Penggalian informasi tentang aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang ini dilakukan dengan

pendekatan naturalistik dengan tujuan untuk memunculkan nilai-nilai lokal yang didapatkan dari temuan-temuan empiris. Profil pemanfaatan lahan/ruang dan mekanisme pemanfaatan lahan/ruang di daerah bantaran sungai di Kabupaten Sleman merupakan fenomena khas yang tumbuh dan berkembang dipengaruhi latar budaya masyarakatnya. Nilai-nilai lokal ini adalah keunikan potensi dan kondisi khas yang terbentuk melalui proses perkembangan panjang dan tidak ditujukan untuk digeneralisir.

Pemahaman terhadap mekanisme, pembagian peran, dan fungsi sosial digali dari praktik-praktik nyata dalam masyarakat. Hal ini kemudian dikerucutkan untuk merumuskan model pemberdayaan masyarakat bantaran sungai dalam pengelolaan ruang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tipologi pemanfaatan lahan bantaran sungai di Kabupaten Sleman

Secara umum, tipologi pemanfaatan bantaran sungai di Kabupaten Sleman dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), seperti ditunjukkan pada Gambar 1, yaitu:

a. Kawasan alami (tidak terbangun)

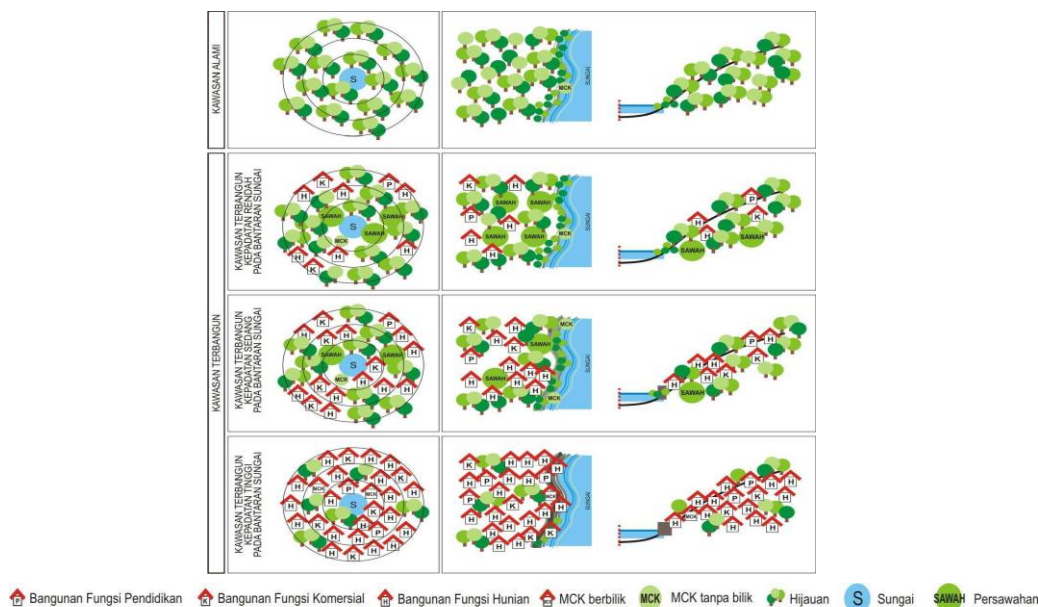
Karakter fisik kawasan ini yang sangat mudah dikenali adalah adanya tutupan hijau di hampir seluruh lahan. Fisik terbangun hampir tidak dijumpai dalam kawasan ini. Sebagian besar talud masih menggunakan batu-batuan dan vegetasi alami.

b. Kawasan Terbangun

Pada kawasan ini dapat dijumpai beberapa bentuk bangunan. Kawasan ini dikategorisasikan dalam 3 (tiga) kelompok berdasar tingkat kepadatannya, yaitu (i) kawasan terbangun dengan kepadatan rendah; (ii) kawasan terbangun dengan kepadatan sedang; dan (iii) kawasan terbangun dengan kepadatan tinggi.

i. Kawasan terbangun dengan kepadatan rendah

Karakter fisik kawasan ini adalah adanya sedikit bangunan fisik diantara dominasi area hijauan. Fungsi bangunan sebagian besar adalah hunian, dan sebagian kecilnya berfungsi komersial dan pendidikan. Letak bangunan-bangunan ini tidak langsung berada di tepi sungai. Fungsi area hijauan antara lain adalah lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Di beberapa tempat ditemukan kegiatan penambangan.



Gambar 1. Tipologi pemanfaatan kawasan bantaran sungai di Kabupaten Sleman

ii. Kawasan terbangun dengan kepadatan sedang

Adanya beberapa bangunan fisik dengan intensitas yang relatif sebanding dengan area hijauan merupakan salah satu ciri khas area/kawasan ini. Beberapa kluster bangunan ada yang terletak tepat di tepi sungai. Persawahan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kegiatan penambangan sudah mulai jarang dijumpai dalam kawasan ini. Bangunan yang berfungsi hunian semakin banyak, demikian pula dengan fungsi pendidikan dan komersial. Perpaduan antara talud alami dan talud buatan (biasanya dari bronjong kawat) dapat pula dijumpai.

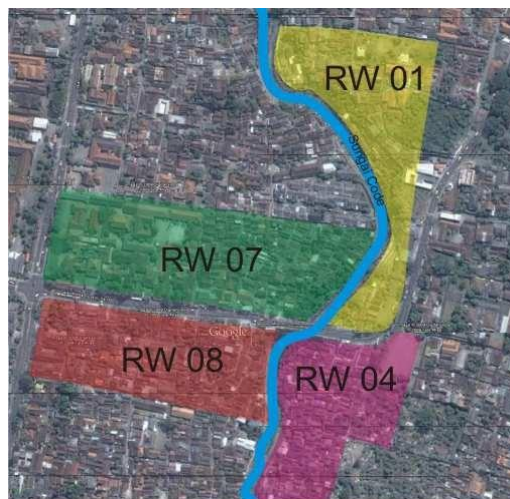
iii. Kawasan terbangun dengan kepadatan tinggi.

Banyaknya bangunan dengan fungsi hunian merupakan ciri utama kawasan kepadatan tinggi. Bangunan dengan fungsi komersial dan pendidikan juga dapat dijumpai dengan jumlah yang tidak sedikit. Banyak bangunan dengan fungsi hunian berada tepat di tepi sungai. Bahkan juga terdapat bangunan dengan fungsi pendidikan yang berada tepat di tepi sungai. Talud buatan dari beton terdapat di sebagian besar wilayah. Fungsi persawahan, perkebunan, peternakan dan perikanan maupun kegiatan penambangan sudah tidak didapati dalam kawasan ini.

Merujuk pada berbagai definisi dan peraturan yang terkait dengan daerah bantaran sungai, pemanfaatan area ini perlu diluruskan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini terutama ditujukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang dalam jangka panjang berpengaruh pada keberlanjutan kehidupan manusia (Kasmawati, 2011). Selain itu, diperlukan panduan pengelolaan daerah ini yang lebih komprehensif dalam upaya pengendalian pemanfaatan daerah bantaran sungai dengan lebih baik (Widodo dkk, 2010).

3.2 Pemberdayaan masyarakat dalam penataan kawasan bantaran Sungai Code utara

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup adalah hal yang sangat mendesak (Arifin, Syamsul. 2005). Hal ini perlu didasarkan pada norma hukum, juga mengupayakan sebesar-besarnya kesadaran dan pelibatan masyarakat. Perkembangan lingkungan global juga merupakan faktor yang selalu perlu dicermati. UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mendasari pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa masyarakat perlu dilibatkan sebesar-besarnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diantaranya dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: 1) Meningkatkan kemandirian masyarakat, keberdayaan masyarakat, dan mengembangkan kemitraan, 2) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, dan 3) Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.



Gambar 2. Kawasan sasaran program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan bantaran Sungai Code utara

Sungai Code merupakan salah satu sungai besar di DIY, mengalir melalui Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Salah satu wilayah yang dilalui adalah kawasan Code Utara yang mencakup sebagian wilayah Kecamatan Jetis dan sebagian wilayah Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Sungai ini mempunyai posisi yang penting di wilayah DIY karena alirannya yang melalui pusat propinsi DIY serta fungsinya sebagai salah satu saluran lahar dari Gunung Merapi yang terletak di sebelah utara DIY.

Kompleksitas permasalahan di satu sisi dan tuntutan lingkungan yang harus diperhatikan di kawasan bantaran sungai mendasari dilakukannya upaya penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di kawasan Code Utara, yang wilayahnya mencakup 4 RW seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Pemerintah juga tidak sedikit melakukan intervensi terhadap kualitas lingkungan di kawasan bantaran Sungai Code. Misalnya dengan pembangunan rumah susun di area permukiman bantaran sungai untuk mengurangi kepadatan. Namun tanpa koordinasi dan kerja yang berlanjut, penataan dan peningkatan kualitas lingkungan sekitar sungai rasanya sulit untuk menghasilkan dampak yang optimal (Widodo dkk, 2010).

Gagasan pengembangan lingkungan permukiman dengan tatanan masyarakat yang mampu mengelola kebutuhannya sendiri (*community management*) adalah sangat mendesak (Korlena, dkk, 2003)

mengingat perlu segeranya membuka peluang untuk menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan inovasi masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk mewujudkan lingkungan yang harmonis, sehat, produktif, berjiwa, dan berkelanjutan, serta mendukung kehidupan sosial dan ekonomi (*entrepreneurship*). Karenanya, penataan dan peningkatan kualitas lingkungan yang berbasis masyarakat merupakan program yang layak digulirkan untuk membentuk tata lingkungan daerah bantaran sungai yang lestari dengan pokok kekuatannya pada masyarakat sebagai wujud partisipasi aktif dalam upaya menciptakan model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan jumlah penduduk sebesar 3.229 jiwa, kepadatan penduduk di kawasan bantaran Sungai Code utara termasuk dalam kategori tinggi. Masyarakat di kawasan bantaran Sungai Code utara menginginkan untuk menjadikan kawasannya sebagai area wisata sehingga pengembangan potensi usaha/ekonomi dan potensi fisik perlu dikaitkan dengan kepariwisataan. Beberapa potensi kawasan yang dapat mendukung hal ini adalah: a) terdapat industri rumah tangga sangkar burung, b) terdapat industri kerajinan tas, ronce melati, industri topeng, dan kerajinan bordir, dan c) terdapat sumber air yang melimpah.

Merujuk pada Sukmana, Omen (2005) dan Noor, Munawar (2011), penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan Code utara dilakukan dengan langkah sebagai berikut.

a. Pendekatan terhadap masyarakat

Langkah awal dalam penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan Sungai Code utara adalah melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Dalam hal ini, perlu digali dan ditumbuhkan motivasi masyarakat untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan tempat bermukimnya.

Motivasi adalah hal terpenting untuk menjamin kelancaran program ini. Dengan motivasi mengembangkan lingkungan yang kuat, program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan diyakini akan dapat terlaksana berkelanjutan sehingga dalam jangka panjang dapat terjadi perubahan positif dalam hal kualitas lingkungan permukiman dan cara pandang serta sikap masyarakat terhadap lingkungan. Artinya, motivasi yang baik merupakan wujud dari pengembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Graha (2009) dan Cook (1994) yang menyatakan bahwa pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sejalan dengan hal ini, Muchtar (2007) dan Giarsi (2001) juga menyatakan bahwa pengembangan masyarakat (*community development*) dipandang sebagai program untuk membantu seluruh anggota masyarakat agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Kegiatan ini dapat berjalan baik apabila didukung aksi kolektif masyarakat dan jejaring yang luas. Widjajanti (2011) mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Perkembangan komunitas ini dicirikan dengan peningkatan kompleksitas masyarakat, tumbuhnya institusi lokal, peningkatan *collective power* dan terjadi perbaikan kualitatif organisasinya.

Dalam proses pendekatan terhadap masyarakat, peranan aktor penghubung sangat penting. Dalam program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan Sungai Code utara, aktor ini adalah tokoh Forum Masyarakat Code Utara (FMCU) yang kebetulan adalah masyarakat setempat dan aktif dalam program-program pengembangan lingkungan seputaran Sungai Code. *Connector person* yang tepat dapat melancarkan dan mempercepat proses pendekatan kepada masyarakat.

b. Penyamaan persepsi dan penggalan aspirasi

Setelah diperoleh kepercayaan dan kebebasan bergerak dari masyarakat, dilakukan penyamaan persepsi dan penggalan aspirasi terkait dengan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan Sungai Code utara. Dalam hal ini, masyarakat diposisikan sebagai subyek pembangunan yang akan merencanakan, melaksanakan, dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Tim eksternal berlaku sebagai fasilitator yang akan menunjang kelancaran program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan Sungai Code utara.

Dalam penggalan aspirasi ini, berbagai ide, kritik, dan keinginan masyarakat terhadap lingkungan mereka digali secara bebas dan terbuka.

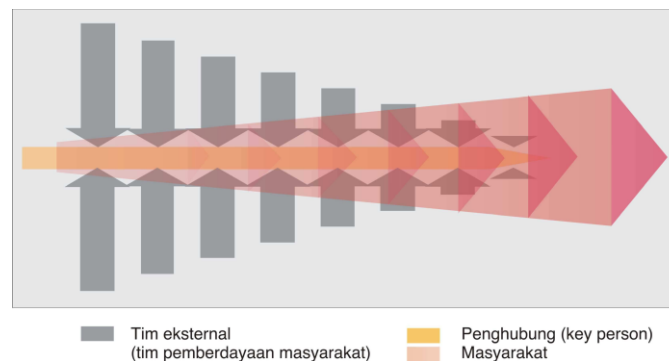
c. Pelibatan masyarakat dalam penilaian kawasan bantaran Sungai Code utara

Langkah selanjutnya adalah penilaian kawasan bantaran Sungai Code utara. Dalam kegiatan ini, tim eksternal berlaku sebagai fasilitator. Masyarakat sebagai pengguna kawasan secara mandiri melakukan penilaian terhadap lingkungannya. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ruang merupakan hal penting karena:

- i. Masyarakatlah yang paling paham tentang kesempatan dan hambatan pengelolaan ruang di wilayahnya;
- ii. Masyarakatlah yang paling berkepentingan pada perumusan strategi untuk masyarakat beradaptasi terhadap lingkungannya;

- iii. Masyarakat sendiri yang akan mengalami kerugian maupun keuntungan sebagai hasil dari pemanfaatan lingkungannya;
 - iv. Masyarakat yang mandiri dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Strategi ini berhasil merumuskan penilaian-penilaian detil dan kritis terhadap kawasan Sungai Code utara. Sebagai pengguna yang sehari-hari menata, mengelola, dan memanfaatkan kawasan, masyarakat mempunyai penilaian yang bersifat komprehensif terhadap kawasan.
- d. Penyusunan peta hijau berdasarkan aspirasi masyarakat
- Hasil evaluasi masyarakat terhadap kawasan bantaran Sungai Code utara digunakan sebagai data awal untuk menyusun rencana penataan kawasan (peta hijau). Peta hijau kawasan bantaran Sungai Code utara merupakan peta identifikasi data, masalah, dan rencana penataan kawasan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan. Peta ini dirumuskan berdasarkan data dan aspirasi masyarakat sehingga dapat mengakomodir variasi aspirasi dan kepentingan yang ada. Diantara berbagai alternatif pengembangan lingkungan yang ada, masyarakat secara musyawarah memutuskan sendiri skala prioritas rencana pengembangannya dan memilih program-program yang dapat dilaksanakan. Strategi ini dapat menghilangkan konflik sosial yang kerap muncul dalam program-program serupa. Terlaksananya kegiatan ini dipengaruhi oleh kuatnya norma sosial yang berkembang di kawasan Sungai Code utara. Prinsip rukun merupakan tata nilai yang melahirkan berbagai praktik baik dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Semangat gotong royong, harmonisasi relasi sosial, dan kepedulian lingkungan yang besar membimbing masyarakat untuk mengendalikan keinginan dan kepentingan pribadi dalam kolaborasi sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Hal ini pula yang kemudian mampu melahirkan organisasi masyarakat yang solid sehingga mampu merumuskan kebutuhan masyarakat dan mengkoordinasikannya dalam berbagai kegiatan terkait dan mencapai efisiensi pemanfaatan dana masyarakat.
- e. Pengembangan fisik kawasan berdasarkan aspirasi masyarakat
- Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, kemudian direncanakan program-program pengembangan dengan skala prioritas yang ditentukan secara musyawarah. Diantara program-program tersebut, direncanakan pengembangan fisik untuk menunjang peningkatan kualitas permukiman di kawasan bantaran Sungai Code utara tersebut. Perencanaan program dilakukan dengan pemahaman bahwa:
- i. Setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan manfaat pertambahan nilai ruang sebagai hasil penataan ruang,
 - ii. Setiap anggota masyarakat berhak mengetahui rencana tata ruang,
 - iii. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk aktif dalam pengelolaan ruang, dan
 - iv. Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh pergantian yang layak apabila terimbas kegiatan pembangunan dan penataan ruang.
- Pengembangan fisik direncanakan, dilaksanakan, dan dikontrol oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini, tim eksternal berperan sebagai fasilitator program untuk menunjang kelancaran dan optimalisasi hasil program.

Strategi ini diterapkan selain untuk mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan yang ada, meminimalkan konflik sosial yang mungkin muncul, juga untuk membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program dan hasil kegiatan tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab masyarakat untuk memelihara dan melanjutkan program akan terbangun. Dari uraian di atas, proses pelibatan masyarakat pada program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan bantaran Sungai Code utara dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Proses pelibatan masyarakat pada program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan bantaran Sungai Code utara

Berbagai strategi dan langkah yang diterapkan dalam program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan Sungai Code utara terbukti mampu membangun dan mengembangkan motivasi dan keaktifan masyarakat dalam pembenahan lingkungannya. Lebih lanjut, masyarakat juga berinisiasi untuk mengembangkan sendiri lingkungannya dengan berbagai program lain secara lebih luas. Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat di kawasan bantaran Sungai Code utara telah berhasil.

3.3. Model pemberdayaan masyarakat dalam penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan bantaran Sungai Code utara

Pemberdayaan masyarakat atau yang lebih sering disebut *community empowerment*, seringkali disalahartikan sebagai penguatan masyarakat atau pembangunan masyarakat (*community development*). Hal ini karena saling tumpang tindihnya praktek dari kegiatan-kegiatan itu karena kemiripan pengertiannya. Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian *community development* dan *community empowerment*, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Secara lebih luas, pemberdayaan adalah proses untuk mendorong masyarakat agar dapat memposisikan diri secara tepat sehingga dapat menjadi aktor utama dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan secara strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan *sustainable development*. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat dapat dianalogikan sebagai generator yang akan mendorong pergerakan masyarakat secara lebih luas untuk mewujudkan pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologi yang dinamis. Keberhasilan upaya pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan mampu mengembangkan mekanisme untuk peningkatan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya.

Pemberdayaan masyarakat dalam penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan bantaran Sungai Code utara melibatkan beberapa aktor baik internal maupun eksternal. Selain itu, terdapat *key person* yang merupakan penghubung antara aktor-aktor ini. Pentingnya peranan *key person* untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program menuntut pertimbangan yang matang dalam memilihnya.

Dalam program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan bantaran Sungai Code utara, tim eksternal lebih berperan sebagai fasilitator, sedangkan aktor utamanya adalah tim internal (masyarakat setempat). Hal ini sejalan dengan pernyataan Fitriani, dkk (2011) bahwa proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim fasilitator inilah yang berperan sebagai salah satu *external factor*.

Pada era pemerintahan yang berjalan saat ini, Pemerintah Desa atau pemangku lokal lainnya lebih berperan aktif dalam pengelolaan bantaran sungai dan wilayah di sekitarnya dibandingkan dengan Pemerintah Kecamatan. Dalam program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan bantaran Sungai Code utara, Ketua RW bersama masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian program. Namun demikian, Ketua RW tidak memiliki kewenangan untuk mengatur lebih jauh tentang kawasan sungai dan pinggirannya. Ketua RW hanya memiliki kewenangan dalam mengorganisir komunitasnya. Dengan demikian, tetap dibutuhkan koordinasi intensif dengan lembaga lainnya.

Peran tim eksternal pada awal proses biasanya dituntut sangat aktif. Namun demikian, peran ini akan menurun secara bertahap sampai masyarakat mampu secara mandiri melanjutkan dan mengembangkan kegiatannya. Selama berjalannya proses pendampingan, inisiatif tim eksternal pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Selanjutnya, peran tim eksternal sebagai fasilitator akan digantikan oleh pengurus kelompok atau tokoh lain yang dianggap mampu.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tema pokok dalam pembangunan masyarakat, perlu diorientasikan searah dengan pemikiran baru / pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan (Chambers dalam Antholt, 2001). Menurut Nasikun (2000) paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertamata-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat. Masyarakat perlu diberi kesempatan agar dapat melibatkan diri dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, sehingga distribusi kemanfaatannya lebih adil bagi masyarakat.

Merujuk pada Nasikun (2000), masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan peran sebagai:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat ini ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian masyarakat, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkan kemampuan serta kepeloporan dalam masyarakat;
- d. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat dalam pengawasan sosial, mengembangkan serta melestarikan budaya/ kearifan lokal dalam rangka melestarikan lingkungan hidup.

Pemahaman penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah bahwa programnya disusun oleh masyarakat sendiri, sesuai permasalahan yang ada, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh lagi, program ini dapat mendukung keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum miskin/kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Program dibangun dengan sumberdaya lokal dan sesuai dengan nilai budaya lokal. Program juga perlu dipertimbangkan untuk memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan tidak menciptakan ketergantungan terhadap pihak-pihak yang terlibat (pihak eksternal) dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Dalam era yang bercirikan dinamika yang cepat dan kompleks serta penuh resiko, diperlukan kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Untuk kepentingan ini, baik individu, kelompok maupun komunitas perlu berupaya untuk ikut berubah, beradaptasi, bahkan berperan untuk mengendalikan perubahan.

Konsep pemberdayaan suatu komunitas, sering kali disebut sebagai *Community Development* merupakan proses untuk membangun jejaring komunikasi dan interaksi yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat tersebut dan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berakhir pada pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. *Community Development* tidak ditujukan untuk mencari solusi atau menghadirkan pelayanan bagi komunitas/masyarakat, namun bekerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan (*Standing Conference for Community Development, 2001*).

Konsep yang mendasari pelibatan masyarakat dalam konteks penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan Sungai Code utara dapat disarikan mencakup dua aspek, yaitu:

a. Aspek Keterbukaan Akses Bagi Semua (ACCESS For ALL).

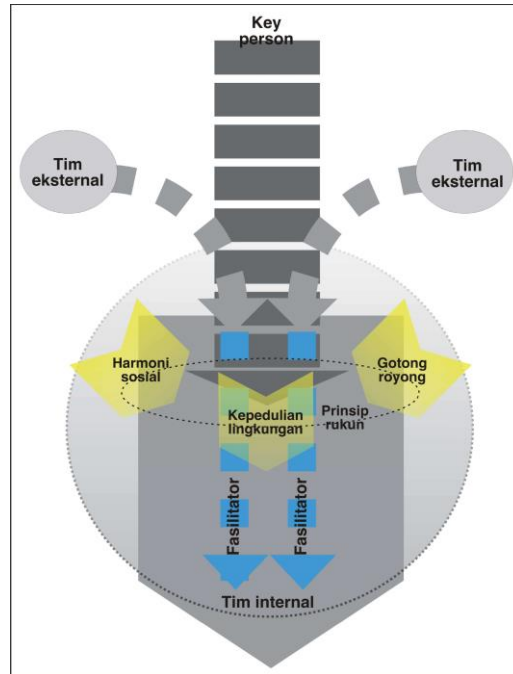
Konsep ini melihat bagaimana sebenarnya masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara nyata dalam bidang-bidang yang menjadi bagian dari penataan dan peningkatan kualitas lingkungan bantaran sungai. Konsep ini mencakup 4 (empat) aspek penting yaitu:

- i. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (*Decision Making Process*): adalah bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan sungai.
- ii. Pengembangan akses terhadap sumberdaya (Resources): adalah bagaimana masyarakat dapat memperoleh akses terhadap sumberdaya setempat seperti permodalan, pelatihan dan fasilitas- fasilitas lain yang berkaitan dengan pemberdayaan bagi masyarakat itu sendiri dsb. Akses ini dapat difasilitasi baik oleh pemerintah maupun swasta.
- iii. Pengembangan fasilitas umum (Public Facilities): adalah bagaimana keberadaan fasilitas umum dalam kaitannya dengan keberadaan komunitas, fasilitas umum harus terbuka juga bagi komunitas dan dapat berperan terhadap pengembangan komunitas.
- iv. Pengembangan infrastruktur komunitas (Infrastructure for Community): adalah bagaimana keberadaan infrastruktur dapat memberikan kemudahan dan akses bagi komunitas setempat.

b. Aspek Strategi Dan Rencana Pengelolaan Penguatan Kapasitas Masyarakat

Strategi	Pokok Program	Arahan Pengelolaan
Pelibatan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan	Melibatkan representatif kelompok masyarakat dalam setiap proses/ perencanaan pengelolaan	Mengadakan sosialisasi dan diskusi dalam setiap proses dan tahap kegiatan pengelolaan yang melibatkan warga masyarakat
	Memberdayakan kelompok/masyarakat melalui kegiatan monitoring rutin/partisipasi oleh otoritas setempat	Rembug desa terutama terhadap pembahasan mengenai pengembangan/rencana pengembangan

Akses Terhadap Sumberdaya	Intermediasi dalam penyelesaian konflik	Pemerintah semestinya mampu menjamin penyelesaian konflik-konflik horisontal maupun vertikal yang terjadi di masyarakat di sekitar bantaran sungai
	Bantuan teknis/ bahan baku usaha	Investor /Pemko dapat mengusahakan bantuan-bantuan teknis seperti peralatan dan material untuk membuat ekodrainase



Gambar 4. Model pemberdayaan masyarakat pada program penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan bantaran Sungai Code utara

Pengembangan Fasilitas Umum /Sosial dan Infrastruktur

Strategi	Pokok Program	Arahan Pengembangan
Pengembangan Infrastruktur Skala Desa	Penataan bantaran sungai	Penataan bantaran sungai dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter sungai setempat
	Prasarana pengolahan air limbah keluarga septik tank dan sumur peresapan rumah tangga serta pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di bantaran sungai	Pembangunan limbah rumah tangga diarahkan kepada pembuatan septik tank dan sumur peresapan per rumah tangga serta IPAL bersama (misal dalam satu RT), menjauhi bantaran sungai
	Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara pada area yang menjauhi bantaran sungai	Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara sebagai elemen penguat karakter kawasan dan menjauhi daerah bantaran sungai untuk peningkatan kualitas kesehatan dan kebersihan lingkungan
	Pembangunan prasarana lingkungan (saluran drainase)	Pembangunan prasarana lingkungan seperti saluran drainase untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan mendukung program kali bersih (prokasih)

Pengembangan Infrastruktur Skala Kawasan	Realisasi Penerangan Jalan dan Area Publik di sekitar bantaran sungai	Penerangan jalan umum diutamakan pada akses-akses menuju sungai dan untuk mendukung aktivitas tepian sungai
--	---	---

Konsep otonomi daerah sangat sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh *Community Development* khususnya pada arahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ruang secara aktif. Kesesuaian antara kebijakan pemerintah dengan konsep pemberdayaan masyarakat ini membutuhkan pendekatan yang tepat dalam mengimplementasikannya. Berdasarkan praktik pengelolaan bantaran Sungai Code utara, dapat dirumuskan model pemberdayaan masyarakat bantaran Sungai Code utara sebagai praktik baik pengelolaan ruang di daerah bantaran sungai seperti ditunjukkan pada Gambar 4.

5. Ucapan Terima Kasih

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional

Artikel ilmiah ini ditulis berdasarkan hasil penelitian Hibah Bersaing yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional. Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Nomor 913.9/K5/PL/2001, tanggal 23 Maret 2011

Daftar Pustaka

1. Antholt, C.H. 2001. Agricultural Extension in the Twenty-First Century dalam Eicher dan Staatz (eds). 2001. International Agricultural Development. Third Edition. Johns Hopkins
2. Arifin, Syamsul. 2005. Strategi Untuk Mengurangi Kerusakan Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Gempa Dan Gelombang Tsunami. Jurnal Arsitektur "ATRIUM", Vol. 02 (01), April 2005: 28-33
3. Cook, JB. 1994. Community Development Theory, Community Development Publication MP568, Department of Community Development, University of Missouri-Columbia
4. Fitriani., Saroni., dan Widodo, Yatim R. 2011. Tingkat Adopsi terhadap Diversifikasi Pangan Berbasis Jagung pada Organisasi Kelompok Masyarakat di Provinsi Lampung. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, Vol. 24 (1), Januari–Maret 2011: 68-73
5. Giarsi, GG. 2001. Caught in Nets: a Critical Examination of the Use of the Concept of Network in Community Development Studies, Community Development Journal, Vol. 36 (1), January 2001: 63-71
6. Graha, Andi Nu. 2009. Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. Jurnal Ekonomi MODERNISASI, Vol. 5(2), Juni 2009: 117-126
7. Kasmawati. 2011. Urgensi Sumber Daya Manusia Dalam Exploitasi Sumber Daya Alam. Jurnal Teknosains, Vol. 5 (1), Januaari 2011: 91-99
8. Korlena., Leksono, Probo Subanu., Subagyo, Pangestu. 2003. Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman di Kelurahan 5 Ulu Palembang. Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 10 (2), 2003: 83-93
9. Muchtar. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Distrik. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12 (02), 2007: 1-10
10. Nasikun. 2000. Reformasi Politik, Demokrasi, dan Integrasi Nasional. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3 (3), 2000: 231-253
11. Nasrullah., Kartiwa. 2010. Analisis Alih Fungsi Lahan dan Keterkaitannya dengan Karakteristik Hidrologi DAS Krueng Aceh. Jurnal Tanah dan Iklim, No 31, 2010: 81-98
12. Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 1 (2), Juli 2011: 87-99
13. Sitorus, S.R.P., C. Leonataris., dan D.R. Panuju. 2012. Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Dan Perkembangan Wilayah Di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Tanah dan Lingkungan, Vol. 14 (1), April 2012: 21-28
14. Subejo dan Supriyanto. 2004. Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Short paper pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Study on Rural Empowerment (SOREm), Fakultas Pertanian UGM tanggal 16 Mei 20014
15. Sukmana, Omen. 2005. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan Melalui Pengembangan Institusi Dan Modal Sosial Lokal. Jurnal Humanity, Vol. 1(1), 2005: 69-75
16. Widjajanti, Kesi. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12 (1), Juni 2011: 15-27
17. Widodo., Ribut Lupiyanto., & Donan Wijaya. 2010. Pengelolaan Kawasan Sungai Code Berbasis Masyarakat. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 2 (1), Januari 2010: 7-20